

PERSPEKTIF TEORI DAN PRAKTIK IMPLEMENTASI SEKOLAH BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Makalah disajikan dan dibahas pada Seminar Nasional
Dengan Tema "Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal
Sebagai Model Pendidikan Berkarakter di Era Global".
Diselenggarakan oleh BEM Universitas Samawa Sumbawa Besar
21 Mei 2011,

Oleh
Dr. H. MUKMINAN
FISE/Pascasarjana - UNY
Email: mukminan@yahoo.co.id
HP: 08157956800

**PANITIA PELAKSANA
PEKAN ILMIAH MAHASISWA SE-NTB
2011**

I. PENDAHULUAN

Terkait dengan upaya peningkatan mutu pendidikan nasional telah ditetapkan visi, misi dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Rencana pembangunan pendidikan nasional jangka panjang 2005-2025 telah dijabarkan ke dalam empat tema pembangunan pendidikan, yaitu peningkatan kapasitas dan modernisasi (2005-2009), penguatan pelayanan (2010-2014), penguatan daya saing regional (2015-2020), dan penguatan daya saing internasional (2021-2025). Adapun Visi Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010–2014 adalah “Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif”. Misi Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010–2014 adalah “Meningkatnya Ketersediaan Layanan Pendidikan, Memperluas keterjangkauan Layanan Pendidikan, Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan, Mewujudkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan, serta Menjamin Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan”. Untuk mencapai keberhasilan visi dan misi tersebut, ditetapkanlah moto/strategi pendidikan nasional, yakni “Melayani Semua dengan Amanah”.

Mengacu pada dengan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, dirumuskan visi Pendidikan Tinggi, yaitu “Terwujudnya sistem pendidikan tinggi yang menghasilkan insan yang **berkarakter**, **cerdas**, dan **terampil** untuk membangun bangsa Indonesia yang bermartabat dan berdaya saing melalui pengembangan ilmu, teknologi, dan seni untuk kemajuan dan kesejahteraan umat manusia yang berkelanjutan”.

Terkait dengan visi Pendidikan Tinggi telah ditetapkan serangkaian prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan pelayanan prima pendidikan yang menyeluruh secara amanah. Salah satu prinsip tersebut adalah pendidikan diselenggarakan sebagai proses untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif sepanjang hayat. Di samping itu, pendidikan tinggi diharapkan mampu memprediksi optimalisasi kompetensi lulusan yang dihasilkan (*out comes*).

Implikasi dari prinsip tersebut adalah pergeseran paradigma pendidikan, yaitu dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran. Istilah pembelajaran berarti proses membuat orang belajar. Tujuannya ialah membantu orang belajar atau memanipulasi lingkungan sehingga memberi kemudahan bagi orang yang belajar. Pembelajaran bukan

hanya terbatas pada kejadian (*event*) yang dilakukan oleh pendidik saja, tetapi mencakup semua kejadian yang mungkin mempunyai pengaruh langsung pada proses belajar peserta didik. Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar lainnya pada suatu lingkungan belajar sehingga pengetahuan berkembang, keterampilan meningkat, dan karakter terbentuk.

Sebagai sebuah sistem yang berkelanjutan, pembelajaran harus direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan dipantau agar terlaksana secara efektif dan efisien. Pembelajaran harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian, serta menghasilkan insan Indonesia cerdas komprehensif dan berkarakter, yang disesuaikan dengan kondisi serta keunggulan local.

Makalah ini akan membahas tentang Perspektif teori dan praktik implementasi sekolah berbasis keunggulan lokal.

II. PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL (PBKL)

Di tengah persaingan global saat ini, pendidikan nasional harus berdaya saing dan berdaya guna. Sejak terjadinya perubahan yang mendasar sebagai akibat perubahan politik dan tata pemerintahan yang semula bersifat sentralistik menjadi desentralistik, saat ini fungsi dan wewenang pemerintah daerah lebih besar dalam membuat kebijakan dan melaksanakannya sesuai dengan variasi potensi, dan kepentingan pengembangan daerahnya masing-masing. Salah satu desentralisasi pendidikan adalah desentralisasi kurikulum. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional hanya menentukan standar-standar minimal yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan di tingkat daerah, yakni berupa Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang terdiri atas 8 standar, yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar penilaian, dan standar pembiayaan (PP no. 19/2005).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas sudah diatur bahwa pelaksanaan pendidikan di luar kewenangan pemerintah pusat dan harus dilakukan di

daerah. Dengan demikian daerah atau sekolah memiliki cukup kewenangan untuk merancang dan menentukan hal-hal yang akan diajarkan. Sehubungan dengan kondisi daerah dan potensi daerah di Indonesia yang cukup beragam, maka daerah perlu menggali, meningkatkan dan mempromosikan potensinya melalui pendidikan di sekolah.

Masing-masing daerah mempunyai keunggulan lokal yang perlu dikembangkan. Keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing daerah sangat bervariasi. Dengan keberagaman potensi daerah ini pengembangan potensi dan keunggulan daerah perlu mendapatkan perhatian secara khusus bagi pemerintah daerah sehingga anak-anak tidak. Sehingga anak-anak daerah tidak asing dengan daerahnya sendiri dan faham betul tentang potensi dan nilai-nilai serta budaya daerahnya sendiri, sehingga anak-anak dapat mengembangkan dan memberdayakan potensi daerahnya sesuai dengan tuntutan ekonomi global yang telah disepakati oleh pemerintah Indonesia.

Tujuan penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global adalah agar siswa mengetahui keunggulan lokal daerah dimana dia tinggal, memahami berbagai aspek yang berhubungan dengan keunggulan lokal daerah tersebut, selanjutnya siswa mampu mengolah sumber daya, terlibat dalam pelayanan / jasa atau kegiatan lain yang berkaitan dengan keunggulan lokal sehingga memperoleh pendapatan dan melestarikan budaya / tradisi / sumber daya yang menjadi unggulan daerah serta mampu bersaing secara nasional maupun global. (<http://sukemo.com/pendidikan/pendidikan-berbasis-keunqqulan-lokal-global/>)

III. PENGEMBANGAN SEKOLAH BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL (SBKL)

A. Konsep Keunggulan Lokal

Keunggulan lokal adalah segala sesuatu yang merupakan ciri khas kedaerahan yang mencakup aspek ekonomi, budaya, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain-lain. Keunggulan lokal dapat berupa hasil bumi, kreasi seni, tradisi, budaya, pelayanan, jasa, sumber daya alam, sumber daya manusia atau lainnya yang menjadi keunggulan suatu daerah. Dengan demikian Keunggulan Lokal (KL) dapat diartikan sebagai proses dan realisasi peningkatan nilai dari suatu potensi daerah sehingga menjadi produk/jasa atau karya lain yang bernilai tinggi, bersifat unik dan memiliki keunggulan komparatif. Keunggulan lokal

harus dikembangkan dari potensi daerah. Potensi daerah adalah potensi sumber daya spesifik yang dimiliki suatu daerah. Kualitas dari proses dan realisasi keunggulan lokal tersebut sangat dipengaruhi oleh sumber daya yang tersedia, yang lebih dikenal dengan istilah 7 M, yaitu *Man, Money, Machine, Material, Methode, Marketing and Management*. Jika sumber daya yang diperlukan bisa dipenuhi, maka proses dan realisasi tersebut akan memberikan hasil yang bagus, dan demikian sebaliknya. (Diambil dari Depdiknas. 2008 oleh Akhmad Sudrajat, <http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/08/13/konsep-dasar-pendidikan-berbasis-keunggulan-lokal-pbkl/>)

Dengan memberdayakan keunggulan lokal di sekolah, diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada seperti: (a) Keunggulan lokal apa yang dapat dikembangkan (2) Bagaimana cara mengembangkannya (3) . infrastruktur apa yang diperlukan (d) Berapa lama pembelajaran keunggulan local dilaksanakan, dan (e) Bagaimana cara pembelajarannya yang efektif dan efisien

B. Potensi Keunggulan Lokal

Konsep keunggulan lokal diinspirasi dari berbagai potensi, yaitu potensi sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), geografis, budaya dan historis.

1. Potensi Sumber Daya Alam

Sumber daya alam (SDA) adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air, dan dirgantara yang dapat didayagunakan untuk berbagai kepentingan hidup.

2. Potensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) diartikan sebagai manusia dengan segenap potensi yang dimilikinya yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menjadi makhluk sosial yang adaptif dan transformatif dan mampu mendayagunakan potensi alam di sekitarnya secara seimbang dan berkesinambungan. Pengertian adaptif artinya mampu menyesuaikan diri terhadap tantangan alam, perubahan IPTEK dan perubahan sosial budaya.

3. Potensi Geografis

Objek geografi antara lain meliputi, objek formal dan objek material. Objek formal geografi adalah fenomena geosfer yang terdiri atas, atmosfer bumi, cuaca dan iklim, litosfer, hidrosfer, biosfer (lapisan kehidupan fauna dan flora), dan antroposfer (lapisan manusia

yang merupakan tema sentral). Pengkajian keunggulan lokal dari aspek geografi dengan demikian perlu memperhatikan pendekatan studi geografi. Pendekatan itu meliputi; (1) pendekatan keruangan (*spatial approach*), (2) pendekatan lingkungan (*ecological approach*) dan (3) pendekatan kompleks wilayah (*integrated approach*).

4. Potensi Budaya

Ciri khas budaya masing-masing daerah tertentu yang berbeda dengan daerah lain merupakan sikap menghargai kebudayaan daerah sehingga menjadi keunggulan lokal.

5. Potensi Historis

Keunggulan lokal dalam konsep historis merupakan potensi sejarah dalam bentuk peninggalan benda-benda purbakala maupun tradisi yang masih dilestarikan hingga saat ini. Pada potensi historis, diperlukan akulturasi terhadap nilai-nilai tradisional dengan memberi kultural baru agar terjadi perpaduan antara kepentingan tradisional dan kepentingan modern, sehingga aset atau potensi sejarah bisa menjadi aset/potensi keunggulan lokal.

C. Konseptualisasi Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal (SBKL)

Setiap daerah memiliki potensi dan keragaman karya yang dihasilkan sebagai ciri khas daerah tersebut. Misalnya, di Dompu ada keunggulan di bidang pertanian dan peternakan, yaitu padi, kambing, sapi dan Kuda. Di Bima ada keunggulan lokal bahari dan pertanian, Sumbawa ada pertambangan dan peternakan, Lombok ada pariwisata dan pertanian, serta keunggulan lokal di daerah lain. (Apen Makese: <http://id-id.facebook.com/topic.php?uid=166500000044821&topic=343>). Satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal merupakan paradigma baru pendidikan untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Dalam hal ini pelayanaan komoditas harus diselaraskan dengan lokalisasi pendidikan dengan basis keunggulan lokal. Hal ini bukan saja berkaitan dengan kurikulum yang memperhatikan muatan lokal (UU Sisdiknas pasal 37 ayat 1 huruf j), melainkan lebih memperjelas spesialisasi peserta didik, untuk segera memasuki dunia kerja di lingkungan terdekatnya.

IV. PERSPEKTIF TEORI DAN PRAKTIK IMPLEMENTASI SEKOLAH BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL (SBKL)

A. Landasan Pembelajaran

Pembelajaran pada setiap satuan pendidikan perlu memperhatikan landasan-landasan filosofis, konseptual, yuridis, dan empiris, sesuai dengan karakteristik peserta didik. Pembelajaran pada satuan pendidikan tinggi merupakan serangkaian kegiatan terstruktur yang mampu mengembangkan potensi peserta didik melalui proses akuisisi, eksplorasi, elaborasi informasi, dan pengalaman belajar dari berbagai sumber untuk menghasilkan insan yang berkarakter, cerdas, dan terampil dalam membangun bangsa Indonesia yang bermartabat dan berdaya saing melalui pengembangan ilmu, teknologi, dan seni untuk kesejahteraan umat manusia secara berkelanjutan. Sebagai konsekuensi bentuk layanan pendidikan yang amanah dan bermutu dengan menetapkan peserta didik sebagai pusat perhatian, pembelajaran harus mampu mengubah perilaku dan mengembangkan kompetensi peserta didik sebagai insan Indonesia cerdas komprehensif dan berkarakter.

Dalam perspektif penyelenggaraan teori pembelajaran perlu memperhatikan landasan sebagai berikut:

1. Pilar Belajar

Pembelajaran harus memperhatikan pilar belajar Unesco "plus" yang meliputi; *learning to know, learning to do, learning to live together, and learning to be*, ditambah dengan pilar *learning to believe in God*, sebagai spektrum penyelenggaraan pendidikan.

2. Dimensi Belajar

Inti pendidikan adalah belajar, dengan dimensi belajar berupa: dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mau menjadi mau, dari tidak biasa menjadi terbiasa, dan dari tidak ikhlas menjadi ikhlas. Belajar merupakan transfer pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*) dan nilai (*values*).

3. Pilar Pembelajaran

Pilar dan dimensi belajar, membutuhkan dua pilar pembelajaran yang meliputi: **pertama** pilar *high-touch*, yang didirikan di atas prinsip dasar "*ing ngarso sung tulodo, ing madyo*

mangun karso, tut wuri handayani”; **kedua** pilar *high-tech*, yang didirikan atas dasar prinsip *”alam takambang jadi guru”*.

4. Muatan Pembelajaran

Pembelajaran yang menegakkan dua pilar pembelajaran (*high touch* dan *high tech*) harus mengandung nilai-nilai: (1) iman dan takwa, (2) inisiatif (kreativitas, kepekaan, semangat, aspirasi, dan ambisi), (3) industrius/*industrious* (kerja keras, keuletan, etos kerja, disiplin, produktif, dan mengutamakan nilai tambah yang positif, dengan berdasar pada ilmu/teknologi/seni, serta memperhatikan K3), (4) individu (bakat, minat, dan perbedaan individu lainnya), dan (5) interaksi (sosial dan kontekstual dengan lingkungan).

5. Hasil Pembelajaran

Hasil pembelajaran, sesuai dengan tahapannya, diharapkan menghasilkan produk yang *ber-triguna*, yaitu *makna guna*, *daya guna*, dan *karya guna*. Pada tahap awal, proses pembelajaran menghasilkan suatu yang bermakna bagi peserta didik, dan dirasakan gunanya oleh peserta didik. Hasil belajar yang bermaknaguna itu merupakan sesuatu yang benar-benar menyatu di dalam diri peserta didik dengan berbagai konsteksnya. Perolehan yang bermakna guna itu mendorong peserta didik (berdaya guna) untuk berperilaku atau berbuat (berkarya guna) sesuai dengan kompetensi dan konteksnya.

B. Perspektif Teori Pembelajaran Berbasis Keunggulan Lokal

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada BAB III pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Selanjutnya pada BAB X pasal 36 ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik, dan pada pasal yang sama ayat (3) butir c menyatakan bahwa Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia dengan memperhatikan keragaman potensi daerah dan lingkungan. Pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat Keterampilan/Kejuruan (butir i) dan muatan lokal (butir j).

David P. Ausubel (Ausubel, 1978) dan Jerome S. Bruner (Bruner, 1977), mengatakan bahwa proses pembelajaran dalam pendidikan akan menjadi lebih menarik, memberi kegairahan pada semangat belajar peserta didik, jika peserta didik melihat kegunaan, manfaat, makna dari pembelajaran guna menghadapi berbagai persoalan kehidupan yang dihadapinya saat ini bahkan di masa depan. Pembelajaran akan memberikan suasana yang menyenangkan (*joyful learning*) jika berkait dengan potensi, minat, hobi, bakat peserta didik dan penerimaan siswa bahwa apa yang dipelajarinya akan berguna bagi kehidupannya di masa depan(*contextual*) karena siswa merasa mendapatkan keterampilan yang berharga untuk menghadapi hidup. Potensi daerah atau keunggulan lokal adalah potensi yang kontekstual yang dapat diangkat sebagai bahan pembelajaran yang menarik di sekolah.

Teori tersebut didukung oleh kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada Bab III pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi/ karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik. Seanjutnya pada BAB IV pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

C. Implementasi Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal (SBKL)

1. Landasan SBKL

- a. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.
- d. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan.
- e. Permendiknas Nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan Permen 22 dan 23 tahun 2006

- f. Permendiknas Nomor 6 thn 2007 tentang perubahan permen nomor 24 tahun 2006
- g. Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
- h. Permendiknas Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
- i. Permendiknas Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana
- j. Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan
- k. Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses
- l. Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
- m. Renstra Depdiknas tahun 2005 – 2009.

2. Identifikasi Potensi Satuan Pendidikan

Untuk menentukan program SBKL yang akan dilaksanakan, setiap satuan pendidikan harus melakukan identifikasi terhadap potensi masing-masing dengan memperhatikan:

1. lingkungan, sarana dan prasarana,
2. ketersediaan sumber dana,
3. sumber daya manusia (pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik),
4. dukungan Komite Sekolah dan masyarakat setempat,
5. dukungan unsur lain seperti dunia usaha/industri,
6. kemungkinan perkembangan sekolah.

3. Identifikasi Jenis Keunggulan Lokal

Penentuan jenis muatan lokal hendaknya didasarkan pada hal-hal berikut:

1. kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik (fisik, psikis, dan sosial);
2. ketersediaan pendidik yang diperlukan;
3. ketersediaan sarana dan prasarana;
4. ketersediaan sumber dana;
5. tidak bertentangan dengan agama dan nilai luhur bangsa;
6. tidak menimbulkan kerawanan sosial dan keamanan;
7. diperlukan oleh lingkungan sekitar.

4. Berbagai jenis keunggulan Lokal yang dapat dikembangkan di antaranya:

1. Kesenian daerah;
2. Tata busana, tata boga, perawatan tubuh, dan sejenisnya;
3. Elektronika (perakitan, perawatan, dan perbaikan alat-alat elektronik);
4. Kewirausahaan, industri kecil (penyiapan, produksi, dan pemasaran);
5. Pendayagunaan potensi kelautan;
6. Lingkungan hidup (pengelolaan dan pelestarian);
7. Pembinaan karakter (etika dan pemberian layanan prima);
8. Komputer (yang tidak termasuk dalam SK/KD mata pelajaran TIK), misalnya perakitan & perbaikan komputer, desain grafis, komputer akuntansi, dan sejenisnya;
9. Bahasa Asing (yang tidak termasuk dalam struktur kurikulum mata pelajaran bahasa Asing).

V. PENUTUP

Pengembangan program PBKL di sekolah bukanlah pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu, satuan pendidikan harus mempersiapkan berbagai hal untuk memperlancar pengembangan keunggulan Lokal yang akan dilaksanakan pada satuan pendidikan masing-masing. Sekolah dan komite sekolah mempunyai wewenang penuh dalam menentukan program PBKL yang akan dilaksanakan. Tim pengembang kurikulum yang sudah dibentuk di setiap satuan pendidikan, bertanggung jawab dalam pengembangan PBKL. Dalam hal ini, perlu dipertimbangkan pula masukan dari guru yang akan mengampu mata pelajaran Muatan Lokal, Keterampilan atau mata pelajaran lain yang relevan. Di samping itu, satuan pendidikan perlu menjalin kerjasama dengan unsur-unsur lain, seperti Tim Pengembang Kurikulum tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, dan instansi/lembaga lain seperti dunia usaha/industry.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmad Sudrajat, <http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/08/13/konsep-dasar-pendidikan-berbasis-keunggulan-lokal-pbkl/>)

Apen Makese: <http://id-id.facebook.com/topic.php?uid=166500000044821&topic=343>

Ausubel, D.P. 1978. *Educational Psychology: A Cognitive View*, New York: Werbwil & Peck.

Bruner, J.S, 1977. *The Process of Education*, Cambridge: Harvard University Press.

Haggett, P. (2001). *Geography: A global synthesis*. New York: Prentice Hall.

PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.

Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan.

Permendiknas Nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan Permen 22 dan 23 tahun 2006

Permendiknas Nomor 6 thn 2007 tentang perubahan permen nomor 24 tahun 2006

Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi

Guru

Permendiknas Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan

Permendiknas Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana

Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan

Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses

Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Renstra Depdiknas tahun 2005 – 2009.

UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

[\(http://sukemo.com/pendidikan/pendidikan-berbasis-keunggulan-lokal-global/\)](http://sukemo.com/pendidikan/pendidikan-berbasis-keunggulan-lokal-global/)